

Strategi China dalam Melindungi Keamanan Nasionalnya di Wilayah Sengketa Laut China Selatan

Kinanti Rizsa Sabilla¹, Ismah Rustam¹, Ahmad Mubarak Munir¹

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

kin.rizsa@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to look at China's strategy for securing its national interests in the disputed South China Sea area. The concept of national power and national interest was utilized in this research, along with descriptive exploratory research methods assisted by concepts. Qualitative and literature studies have been used as data collection methods. This study aims to show that China's sincerity in asserting claims over the disputed South China Sea is not an ordinary claim. The claim action is a serious action to protect the country's national interests in both national security as well as the economy. This is due to China's belief that the South China Sea is an existing part of its territory based on ancient Chinese shipping maps, which will be maintained along with the acquisition of rights to the nine-dash line based on traditional maps. This study reveals that China's strategy is to use national power, both military and latent power.

Keywords: China Strategy, National Interest, National Power, South China Sea.

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana strategi China dalam melindungi kepentingan nasionalnya di wilayah sengketa Laut China Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *national power* dan *national interest* dengan metode penelitian deskriptif eksploratif yang dibantu dengan konsep. Metodologi yang digunakan berupa metode kualitatif dan studi kepustakaan sebagai metode dalam pengumpulan datanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keseriusan China dalam melakukan klaim atas wilayah sengketa Laut China Selatan bukanlah sebuah tindakan klaim biasa. Tindakan klaim tersebut merupakan sebuah tindakan serius untuk melindungi kepentingan nasionalnya, baik di bidang keamanan nasional hingga ekonomi. Hal ini dikarenakan, bagi China, Laut China Selatan merupakan bagian teritorial China yang telah ada berdasarkan peta pelayaran kuno China yang akan terus dipertahankan beserta perolehan hak-hak atas *nine dash line* sesuai peta tradisional yang diyakini oleh China. Penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang digunakan oleh China adalah dengan memanfaatkan *national power* baik *military* maupun *latent power*.

Kata Kunci: Strategi China, National Interest, National Power, Laut China Selatan.

PENDAHULUAN

Isu keamanan merupakan sebuah topik yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan internasional. Isu ini terus berkembang dari masa kolonial hingga saat ini, bahkan banyak pemikir yang mengungkapkan pendapatnya bahwa berakhirnya Perang Dingin akan membawa dunia ke dalam masa yang penuh dengan kedamaian. Namun pada kenyataannya, setelah Perang Dingin usai, rivalitas politik, diplomasi, ekonomi, teknologi, ideologi bahkan militer antar negara-bangsa di dunia tetap terjadi. Dunia tetap dalam kondisi anarki yang memperlihatkan adanya gesekan antar negara-bangsa.

Arogansi yang dimiliki oleh negara yang memiliki *power* lebih besar kerap digunakan untuk menekan negara lain demi meraih kepentingan di satu pihak. Tekanan yang diberikanpun dapat berupa tekanan politik maupun tekanan militer untuk meraih *power* yang lebih.

Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu panggung bagi China untuk memperluas *power* yang dimilikinya. Kompleksitas perseteruan yang terjadi di Laut China Selatan membelah jati diri negara-negara di Asia antara pragmatisme politik dan kehancuran integritas kebangsaan. Jika berdasarkan pada sejarahnya, wilayah Laut China Selatan memiliki peran dalam aspek geopolitik yang mampu mempengaruhi negara-negara yang berada di sekitarnya untuk terlibat ke dalam sebuah sengketa wilayah. Hal ini dikarenakan di dalam Laut China Selatan terdapat banyak jenis ikan dan kekayaan alam lainnya yang mampu mendukung kekuatan ekonomi, politik hingga keamanan. Selain itu, Laut China Selatan juga merupakan perairan dengan nilai geografis yang tinggi, dikarenakan digunakan sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional.

Batasan Laut China Selatan sangatlah luas dan mencakup beberapa negara yang memiliki kepentingan di dalamnya. Laut China Selatan didefinisikan perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut, berbatasan di sebelah selatan dengan 3 derajat lintang selatan antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, atau tepatnya di Selat Karimata Indonesia, dan di sebelah utara dibatasi oleh Taiwan dari ujung utara Taiwan ke arah Pantai Fukien, China (Sitohang et al., 2008, p. 29). Terdapat enam negara yang mengklaim Laut China Selatan, keenam negara tersebut adalah China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Konflik yang hadir di kawasan ini berkaitan dengan banyaknya klaim tumpang tindih dari negara-negara yang berkonflik, dimana klaim tersebut banyak berdasar pada pulau beserta karangnya, garis batas laut teritorial, landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Klaim yang dilakukan China di LCS mulai menjadi sebuah perhatian yang serius di dunia internasional pada tahun 2009, dimana pada saat itu pemerintah China mengirimkan sebuah *Note Verbale* tertanggal 7 Mei 2009, yaitu sehari setelah pemerintah Malaysia dan Vietnam mengirimkan rancangan kerjasama eksplorasi sumberdaya di wilayah laut kedua negara. Di dalam *Note Verbale* tersebut China secara tegas mengatakan:

'China has indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea and the adjacent waters, and enjoys sovereign rights and jurisdiction over the relevant waters as well as the seabed and subsoil thereof (see attached map). The above position is consistently held by Chinese government, and is widely known by the international community' (UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), 2009).

Dunia internasional melihat Laut China Selatan ini sebagai perairan internasional atau sebagai laut tanpa pemilik. Namun tindakan yang dilakukan oleh China dalam klaimnya dianggap cerdas. China mengajukan klaim atas Laut China Selatan berdasarkan fakta sejarah, penemuan situs, dokumen kuno, peta-peta kuno dan penggunaan gugus pulau oleh nelayan China. Awal klaim China atas Laut China Selatan ini telah termuat dalam sejarah China pada tahun 1935 oleh sebuah komite inspeksi daratan dan perairan China yang menerbitkan sebuah peta yang diberi nama *Zhongguo Nanhai Daoyu Tu*, atau Peta Kepulauan China di Laut China Selatan (Asmoro, 2016, p. 65).

Kemudian pada tahun 1947, Pemerintah Nasionalis China kembali mengeluarkan sebuah peta yang diberi nama Peta Laut China Selatan yang mencantumkan 11 garis putus-putus (*eleven dash line*) yang mengacu kepada peta terbitan tahun 1935. Setelah RRC resmi dibentuk pada 1 Oktober 1949, Pemerintah China mulai memproduksi Peta LCS namun hanya mencantumkan 9 garis putus-putus (*nine dash line*) yaitu dengan menghilangkan dua buah garis yang menunjukkan area di Selat Tonkin (Asmoro, 2016, p. 65). Hingga saat ini, China terus mempertahankan eksistensinya dikarenakan tiga hal, yakni ekonomi, politik dan keamanan. Bagi China, dalam jangka panjang cadangan minyak yang ada di Laut China Selatan akan digunakan untuk menopang kebutuhan dalam negeri. Sedangkan dari aspek politik, China berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Laut China Selatan dianggap sebagai teritorial China untuk memproyeksikan peranan strategisnya secara aktual.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, sebagai bahan pertimbangan, perbandingan dan kajian. Adapun hasil beberapa penelitian tersebut dijadikan perbandingan tidaklah terlepas dari topik penelitian, yaitu Strategi China dalam Melindungi Keamanan Nasionalnya di Wilayah Sengketa Laut China Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Setyasih Harini (2011) dalam artikelnya yang berjudul Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut China Selatan, di mana fokus dari penelitiannya adalah kepentingan nasional China di bidang ekonomi. Laut China Selatan sendiri merupakan sebuah kawasan dengan sumber daya alam yang melimpah, di mana hal ini diikuti dengan potensi konflik yang ada di kawasan. Asumsi tersebut terbangun dikarenakan sulitnya memberikan batasan-batasan wilayah laut dari negara-negara pantai di sekitar Laut China Selatan (Harini, 2011).

Lebih lanjut, banyaknya sumber daya alam yang ada di Laut China Selatan menyebabkan enam negara pantai yakni China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam melakukan berbagai usaha untuk mendaratkan klaim atas Laut China Selatan. China adalah salah satu negara pantai yang bersengketa menjadi negara pertama yang mengajukan klaimnya. Klaim tersebut berlandaskan pada faktor *historic* atau sejarah dan pemanfaatan laut oleh para nelayan sebagai tempat mencari ikan dan jalur perdagangan kuno, di mana klaim yang diajukan semakin lama terlihat sangat agresif dan tumpang tindih dengan ZEE bahkan teritori negara lainnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energy baru agar China dapat lebih memposisikan diri sebagai *the big power* di kawasan regional dan internasional (Harini, 2011).

Selain penelitian yang telah dilakukan di atas, Untung Suropati, Yohanes Sulaiman dan Ian Montratama (2016) dalam bukunya yang berjudul Arungi Samudra bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, telah menjadi salah satu acuan penulis dalam penelitian terdahulu. Penelitian tersebut memfokuskan pada isu-isu geopolitik antara Indonesia dan China, dimana kebangkitan China sebagai salah satu kekuatan global pada abad 21 telah mengubah arsitektur geopolitik dan peta keamanan internasional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Klaim yang telah diajukan beberapa kali oleh China dinilai sebagai salah satu ancaman bagi negara sekitarnya yang juga ingin melakukan klaim atas Laut China Selatan. Selain

melakukan klaim, China juga membangun Jalur Sutra Maritim abad ke-21 yang dikatakan memiliki tujuan yang damai dan murni dilandasi oleh motif ekonomi (Suropati et al., 2016).

Sebagai salah satu kekuatan global baru, China dinilai berambisi memadukan kedua jalur perdagangan laut dan darat yang telah berlangsung selama ratusan tahun menjadi satu konsep jalur perdagangan yang terintegrasi, yang dikenal sebagai *One Belt One Road* (OBOR). OBOR sendiri dinilai sebagai salah satu strategi China untuk mencapai kepentingan nasionalnya, khususnya kepentingan ekonomi di wilayah sengketa Laut China Selatan (Suropati et al., 2016). Selain itu, penelitian ini juga melihat peluang sinergitas antara OBOR dan strategi Poros Maritim Dunia milik Indonesia sebagai penunjang keberhasilannya.

Lebih lanjut, Sinisa Vukovic (2020) dalam tulisannya yang berjudul "Halting and Reversing Escalation in the South China Sea: A Bargaining Framework", menyatakan bahwa konflik yang terjadi di area sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu konflik dengan domain yang berupa keamanan. Hal ini dikarenakan kurangnya keseimbangan strategis kawasan yang mengakibatkan pada rasa ketidakpercayaan dan ketidakstabilan negara di kawasan. Interpretasi historis juga kerap dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan. Kebangkitan kekuatan ekonomi, politik hingga militer China menyebabkan Beijing mampu untuk mempertahankan resistensi yang lemah terhadap tekanan normatif dalam bentuk apapun sembari melakukan pengelolaan untuk mengubah keadaan kontekstual saat ini dengan *power* dan negosiasi. Penelitian yang dilakukan oleh Vukovic ini membantu penulis dalam melihat faktor sejarah dalam mempertahankan Laut China Selatan digunakan oleh China untuk melakukan klaim, namun di saat yang bersamaan berupaya untuk menghindari pertarungan militer yang tidak perlu, sehingga perlu untuk dihindari di LCS dengan *latent power* dan negosiasi yang dilakukan Beijing (Vuković & Alfieri, 2020).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif eksploratif yang dibantu dengan konsep. Pendekatan deskriptif eksploratif ini merupakan tipe pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berkaitan dengan pertanyaan penelitian mengenai "apa fenomena yang diteliti" (Martono, 2015, p. 197). Kemudian untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi pustaka, dimana studi pustaka merupakan proses mencari, membaca, memahami dan menganalisis berbagai literatur, hasil penelitian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif, peneliti lebih memilih untuk menggunakan metodologi kualitatif dalam analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti saran Miles dan Huberman (1994), dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, menjelaskan bahwa secara umum, proses analisis data kualitatif melibatkan empat komponen penting, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi, penarikan kesimpulan (Martono, 2015, pp. 11–12).

KERANGKA PEMIKIRAN

NATIONAL INTEREST

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep, yakni konsep *national interest* dan *national power*. Menurut Hans J. Morgenthau, teori kepentingan atau *interest theory* merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral dan legal yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar *power* atau kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik paksaan atau kerjasama. Demikianlah Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional.

Kepentingan dari suatu negara memberikan gambaran akan aspek-aspek identitas serta fundamental suatu negara. Hal tersebut terlihat dari sejauh mana negara yang bersangkutan memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Dari gambaran aspek identitas dan fundamental tersebut, maka dapat dirumuskan pula apa yang akan menjadi target bagi negara dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu panjang. Konsep kepentingan Morgenthau di atas ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri, kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan (Sitepu, n.d., p. 165). Menurut Nuechterlein, ada empat kepentingan dasar yang memotivasi suatu negara untuk menjalankan kepentingan nasional, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi, kepentingan tatanan dunia dan kepentingan pertahanan (Jasmine, 2013).

NATIONAL POWER

Untuk meraih kepentingan nasional tersebut, suatu negara haruslah memanfaatkan kekuatan nasionalnya secara optimal. *National power* sendiri adalah suatu kekuatan yang sangat kompleks, yang merupakan panduan bermacam unsur kekuatan bangsa dan negara, yang wujudnya adalah keuletan, ketangguhan dan kemampuan bangsa dan negara untuk menjamin kepentingan nasionalnya dan menanggulangi semua ancaman yang membahayakan kelangsungan hidupnya (Kusumoprojo, 2009, pp. 147–148). *National power* pada umumnya tidak akan terlepas dari *power* atau kekuatan, yang mana merupakan sesuatu yang dihasilkan dalam dan selama proses sosial yang memiliki dampak terhadap aktor yang memungkinkan untuk memperoleh kontrol terhadap nasibnya.

Menurut Morgenthau, *power* merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk menentukan dan memelihara kontrol atau kekuasaan atas orang lain dan *power* meliputi seluruh hubungan sosial, mulai dari kekerasan psikologis yang tidak terlihat jelas, melalui mana seseorang dapat mengontrol orang lain (Morgenthau, 1973, p. 9). Unsur atau instrumen *national power* dari berbagai negara sangat bervariasi tetapi pada umumnya adalah unsur geografi, demografi, politik, ekonomi dan militer. Asumsi dasar dari konsep ini adalah memahami bahwa kekuatan nasional tidak hanya berasal

dari kekuatan militer saja, tetapi juga berasal dari kekuatan non-militer seperti kebijakan, populasi, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan industri.

Dalam penelitian ini, penulis membagi *national power* menjadi dua, yakni *latent power* dan *military power*. *Latent power* merujuk kepada kemampuan sosial-ekonomi negara yang ditujukan untuk membangun kekuatannya. Kemampuan sosial-ekonomi negara ini biasanya berupa kekayaan negara dan populasi di dalam negara. Kemudian, kekuatan militer adalah unsur yang penting dalam kekuatan negara. Kekuatan militer sebagian besar terbentuk dari besarnya ukuran dan kuatnya tentara negara dan kekuatan angkatan laut dan udara yang dimilikinya serta kemampuan nuklir yang dimiliki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN PRINSIP FUNDAMENTAL CHINA SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN KEAMANAN DAN DOKTRIN PERTAHANAN

Berangkat dari konsep *National Interest*, yang menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada ideologi dan prinsip fundamental digunakan sebagai instrumen tindakan politik dari negara tersebut. Prinsip fundamental ini berguna sebagai landasan aktor untuk mengambil kebijakan dan meramu doktrin pertahanan serta strategi untuk mencapai kepentingan nasional. Kebangkitan China sebagai salah satu kekuatan yang dianggap akan menggantikan dominasi Amerika Serikat tentu tidak terlepas dari kebijakan strategis Bangsa China sendiri dalam menyikapi kecenderungan yang ada. Sejak kemenangan Partai Komunis China (PKC) dan berdirinya Republik Rakyat China pada tahun 1949, China secara resmi menggunakan ideologi sosialis-komunis dan PKC sebagai pemegang tunggal otoritas kekuasaan. Sebagai sebuah negara sosialis-komunis, China menggunakan ideologi komunisme oleh Marx dan Lenin (Lewi, 2009, p. 1).

Sebagai negara komunis, tugas China sejak masa lalu hingga saat ini adalah menentang kapitalisme. Pada sekitar tahun 1951, pemerintah mulai melancarkan serangkaian gerakan yang diarahkan untuk membasmi kapitalis. Hal ini kemudian berdampak pada kebijakan luar negeri China. Perubahan kebijakan luar negeri China selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari gambaran dunia Mao Zedong. Gambaran dunia Mao merupakan kesepakatannya terhadap Teori Dua Kubu Uni Soviet tahun 1947. Menurut teori ini, Mao membagi dunia ke dalam dua kubu, yakni kubu sosialis dan imperialis (Lewa, 2007, p. 69). Kemudian, Mao kembali mengeluarkan teori Zona Antara pada tahun 1957. Teori ini muncul diakibatkan ketidakpuasan China terhadap Uni Soviet dan meningkatnya perhatian China pada Asia dan Afrika. Zona Antara ini sendiri dimaksudkan sebagai daerah penyangga yang terletak di antara dua kekuatan besar AS dan Uni Soviet, dimana terdapat daerah-daerah jajahan, setengah jajahan dan negara baru merdeka. China beranggapan dua *super power* saat itu berusaha menguasai Zona Antara sehingga China kemudian menjalankan strategi permusuhan terhadap dua negara adidaya tersebut (Lewa, 2007).

Teori Zona Antara tersebut tidak dapat berlangsung lama dan tidak mendapat bentuk yang final. Namun, teori tersebut menjadi cikal bakal lahirnya Teori Tiga Dunia yang juga dikemukakan oleh Mao pada tahun 1974 yang membagi negara di dunia menjadi tiga, yakni AS dan Uni Soviet sebagai negara dunia pertama, Eropa dan Kanada

sebagai negara dunia kedua, serta China dan Asia (kecuali Jepang), negara-negara Afrika dan Amerika Latin sebagai dunia ketiga. Aspek yang cukup menonjol dalam teori ini adalah hasrat China untuk tampil sebagai pemimpin bagi dunia ketiga. Hal ini antara lain terlihat dari usaha China untuk menyatukan negara-negara dunia kedua dan dunia ketiga dengan membentuk front persatuan menentang hegemonisme (Lewa, 2007, pp. 70–71).

Sedangkan untuk saat ini, Xi Jinping lebih memilih untuk meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulunya. Meski demikian, Xi Jinping dalam memajukan dan mensejahterakan China telah memfokuskan pembangunannya ke arah Laut China Selatan. Hal ini disadari oleh Xi bahwa laut merupakan penghubung setiap benua dan negara yang ada di dunia dan sangat berguna untuk jalur perdagangan. Klaim yang dilakukan oleh China sejak 1936 mencuat ketika China mengungkapkan doktrin *Nine Dash Line* atau *Zengmu Ansha*, sebagai dasar klaim China atas laut dan pulau-pulau yang ada di Laut China Selatan. *Zengmu Ansha* ini dapat dinyatakan sebagai doktrin karena rakyat dan pemerintah China selain melakukan internalisasi peta tersebut kepada rakyatnya dengan paham wilayah penangkapan ikan tradisional China.

DOKTRIN PERTAHANAN CHINA

Studi mengenai *People Liberation Army* (PLA) dominan mengkarakteristikan evolusi doktrin militer China ke dalam 4 (empat) proses tahapan, antara lain *People's War*, *People's War Under Modern Conditions*, *Local/ Limited War*, dan *Local/ Limited War under High Technology Conditions* (Ng, 2005, p. 16). Orang pertama yang mengungkapkan pemikiran atas konsep *people's war* adalah Mao Zedong, dimana terdiri dari dua komponen fundamental, yaitu *people's war* (doktrin militer) dan *active defense* (strategi militer) (Wirawan & Subekti, 2012, p. 55). Doktrin militer (*junshi zidao sixiang/zhunze*) menyediakan pandangan politik dalam jenis peperangan dan juga panduan militer bagi angkatan bersenjata untuk diikuti. Pada pertengahan 1960-an, *people's war* yang menjadi doktrin pertahanan saat itu mempersiapkan negara untuk melakukan 'perang nuklir awal', yang mana periode perang total ini ditandai dengan sikap tergesa-gesa untuk mengembangkan senjata nuklir dan wahana pengiriman dengan pemahaman jelas dari efek penggetar (Wirawan & Subekti, 2012, p. 56).

Kemudian pada tahun 1970, di saat Deng Xiaoping mengambil alih kepemimpinan China, ia mengganti doktrin militer milik Mao dari 'memancing musuh ke dalam dan mempersiapkan peperangan total' menjadi 'perang lokal di tepi wilayah China'. Namun, Deng tetap berhati-hati dalam melakukan perubahan doktrin ini menjadi *People's War under Modern Conditions* yang menunjukkan hubungan eksplisit dengan pemikiran revolusioner Mao. Kemudian beranjak ke tahun 1980-an, militer China memulai pemberian perhatian kepada peperang lokal dan menggabungkan pandangan tersebut ke dalam doktrin militer China. Jika dilihat kembali, China mengikuti kepemimpinan Rusia dalam pengembangan doktrin perang lokal, terpecahnya aliansi Sino-Soviet menyebabkan ketentuan para pemimpin China yang intensif pada perang nuklir mengikuti pengembangan tersebut (Wirawan & Subekti, 2012, p. 57). Hal ini menyebabkan China tidak mempersiapkan diri untuk perang lokal lebih dari tiga dekade, yang berada di ujung yang berlawanan dengan 'perang total' dalam spektrum konflik (Ng, 2005, p. 39).

Pada tahun 1993, para pemimpin memutuskan PLA harus mempersiapkan kemenangan perang lokal dalam kondisi modern, terutama dalam kondisi dengan teknologi tinggi, dimana hal ini dibahas pada pertemuan *Central Military Commission* (CMC). Perang dengan teknologi tinggi ini diartikan sebagai sebuah kontes persenjataan antara sistem peperangan dengan teknologi tinggi yang mengendalikan sistem persenjataan dari level produksi teknologi yang modern dan mampu melakukan perang dengan metode operasional yang sepadan, dimana elemen-elemen perang seperti tujuan perang, sasaran, kemampuan melakukan peperangan, ruang serta waktu yang terbatas (Ng, 2005, p. 107).

Dalam Buku Pertahanan China tahun 2008, disebutkan bahwa kebijakan pertahanan China memasuki tahapan yang baru, meliputi penegakan keamanan dan persatuan nasional, penjaminan kepentingan pembangunan nasional, pencapaian di semua bagian, pembangunan yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari kekuatan bersenjata dan keamanan nasional China, peningkatan kinerja angkatan bersenjata dengan informasionalisasi sebagai pengukur utama, penerapan strategi pertahanan aktif, mengejar strategi pertahanan negara dengan nuklir dan mengembangkan lingkungan keamanan China yang kondusif untuk mendukung perkembangan China yang damai (Wirawan & Subekti, 2012, pp. 58–59). China menerapkan strategi pertahanan aktif yang memenuhi prinsip-prinsip operasi pertahanan, membela diri dan melakukan penyerangan serta mendapatkan keunggulan dari musuh hanya setelah mereka melakukan serangan.

PENGERAHAN POSTUR PERTAHANAN DAN GELAR KEKUATAN SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN

Berangkat dari konsep *National Power*, yang menyatakan kekuatan suatu negara terdiri dari berbagai macam unsur kekuatan bangsa dan negara, yang wujudnya adalah keuletan, ketangguhan dan kemampuan bangsa dan negara untuk menjamin kepentingan nasionalnya serta menanggulangi semua ancaman untuk kelangsungan hidupnya. Postur pertahanan menjadi bagian dari kekuatan suatu negara yang dihasilkan dalam dan selama proses sosial yang memiliki dampak terhadap aktor yang memungkinkan untuk memperoleh kontrol terhadap nasibnya. Postur pertahanan sendiri adalah gambaran mengenai kekuatan pertahanan yang mencakup kemampuan, kekuatan, gelar kekuatan, serta sumber-sumber daya nasional (Prasetyono, 2008, p. 358). Postur pertahanan negara diarahkan sesuai dengan kemampuan pertahanan militer dan nirmiliter yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan yang strategis (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, p. 101). Postur pertahanan dibentuk dan dikembangkan berdasarkan pada doktrin dan strategi pertahanan dengan memperhatikan geopolitik dan geostrategi negara (Prasetyono, 2008, p. 358).

1) *Latent Power* China

a) Populasi China

China sendiri merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia. Dengan memanfaatkan jumlah usia produktif yang melebihi setengah dari total populasi, China telah berhasil menjadi salah satu raksasa ekonomi di dunia dan menstabilkan industri, komunikasi dan keamanan. Adapun jumlah populasi

China adalah 1.339.724.852 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,47%. China memiliki angka kelahiran 13,71/1000 populasi dan angka kematian 7,03/1000 populasi. Angka harapan hidup di China dapat dikatakan tinggi, di mana angka ini mencapai usia 73,18 tahun. Selain itu, struktur umur untuk usia produktif 15 hingga 64 tahun adalah 71,90%, sedangkan usia 0-14 tahun sebesar 20,10% dan usia 65 tahun ke atas sebesar 8% (Wirawan & Subekti, 2012, pp. 32–33).

Dilihat dari data di atas, hampir setengah dari usia produktif tersebut merupakan personil PLA yang terlatih dan seluruhnya telah menjalani wajib militer. Berdasarkan data dari terbitan CSIS, adapun jumlah personil PLA di tahun 2015 terdiri dari 1,6 juta personil PLA *Ground*, yang terbagi menjadi pasukan paramiliter sejumlah 660 ribu, dan pasukan cadangan 510 ribu; PLA *Air Force* sejumlah 398 ribu personil; PLA *Navy* sejumlah 235 ribu personil; dan PLA *Second Artillery Corps* sejumlah 100 ribu personil.

b) Anggaran Pertahanan China

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan China, Mayor Jenderal Chen Zhou menyampaikan bahwa peningkatan anggaran pertahanan nasional China digunakan untuk mengembangkan senjata dan peralatan terbaru, meningkatkan kondisi pelatihan, menjamin reformasi militer dan manfaat bagi petugas serta personel lainnya. Selain itu, Zhang Yesui mengatakan China telah meningkatkan input pertahanannya dengan sedikit keuntungan dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan peningkatan akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan akan melayani kepentingan keamanan dan pembangunan nasional. Ia juga menambahkan bahwa anggaran pertahanan China masih tergolong rendah dari negara-negara besar lainnya. China mengumumkan pada tanggal 5 Maret 2018 bahwa anggaran pertahanan meningkat 1,11 triliun yuan atau sebesar 175 miliar USD dari tahun sebelumnya yang sebesar 151 miliar USD (Global Security, n.d.).

c) Industri Pertahanan China

China telah menetapkan tujuan untuk bergabung dengan barisan terkemuka kekuatan industri pertahanan di dunia, yang di mana hal ini memiliki banyak usaha dalam memenuhinya, seperti dana, dukungan politik, serta teknologi. Adapun industri pertahanan di China terbagi menjadi beberapa sektor, yakni Sektor Aviasi, *Ordnance*, *Ship-building*, *Space*, *Nuclear*, dan *Defense Electronics*. Di bidang aviasi, China telah mampu membangun J-10 *fighter*, J-11 *fighter*, JH-7 *fighter-bomber*. Kemudian di bidang *Ordnance* ada *Type 99 main battle tank*, *armoured fighting vehicles*; *Type 95 self-propelled anti-aircraft artillery*, *small arms*.

Kemudian pada sektor *ship-building*, China telah mampu membangun *Nuclear (type 93 nuclear attack) and conventional submarines*, *frigates (type 54A Jiangkai)*, *destroyers (type 52C Luyang)*; *Submarines*, *frigates*, *destroyers*, *missile boat*. Pada sektor *Space*, terdapat *Strategic and tactical missile*, *satellites*, *manned spacecraft*. Selanjutnya pada sektor *nuclear* terdapat *Nuclear Reactors*; *Nuclear Power-Plant Construction*. Terakhir, di sektor *defense electronics*, terdapat *Radars*, *electronic-warfare equipment* (Wirawan & Subekti, 2012, pp. 35–36).

2) *Military Power China*

a) *Tank*

Tank tempur utama merupakan salah satu sistem persenjataan dengan tingkat kehancuran tinggi yang digunakan baik untuk pertahanan maupun menyerang. China sendiri memiliki tank tempur utama tipe 98A/99 sebanyak 450 unit, tipe 96/96 sebanyak 1500 unit, tipe 88A/ 88B sebanyak 500 unit, tipe 79 sebanyak 300 unit, dan tipe 59/59D/59-II sebanyak 4300 unit (Sharma, 2012, p. 46).

b) *Combat Aircraft*

Pesawat tempur merupakan salah satu jenis alutsista ofensif yang dimiliki oleh suatu negara. Alutsista ini dapat menjalankan berbagai peran sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya, mulai dari melakukan penjagaan ruang udara, penyergapan, supremasi udara, serangan darat, pemboman taktis hingga pesawat tempur *multirole*. Keunggulan yang dimiliki oleh alutsista ini membuatnya dapat diterjunkan ke daerah konflik dengan cepat, selain itu dengan teknologi canggih, pesawat tempur generasi kelima telah dibuat dengan desain sulit dideteksi oleh radar. Dari PLA *Air Force* sendiri terdapat 1.687 pesawat. Kemudian dari PLA *Navy* terdapat 311 *combat capable*.

c) *Warships*

Kapal Perang ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, terdapat kapal selam, dimana termasuk dalam senjata strategis yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan alutsista lainnya. Karakteristiknya yang ofensif didapat dari kemampuan mobilitasnya yang sangat tinggi juga kemampuan untuk sulit dideteksi oleh radar musuh. Selain itu, kemampuannya untuk meluncurkan beragam misil berhulu ledak nuklir dengan memiliki daya jangkauan yang beragam membuat kapal selam menjadi salah satu alutsista puncak yang memiliki efek yang luar biasa. Kehadiran kapal selam dalam barisan alutsista suatu negara menunjukkan ambisi suatu negara dalam kekuatan nasionalnya. China sendiri memiliki 71-unit *submarine*. Kemudian terdapat jenis *destroyers*. *Destroyer* atau kapal perusak merupakan salah satu jenis kapal perang yang mampu bergerak dengan cepat ditambah *maneuver*. Fungsi dari kapal perang ini adalah untuk memproteksi kapal perang yang berukuran lebih besar seperti kapal induk, kapal perang utama ataupun kapal kelas *cruiser*. Saat ini China memiliki 13 unit *destroyer*.

Terakhir terdapat *frigates*. Kapal ini adalah salah satu jenis kapal perang di bawah kelas *destroyer*. Kapal ini mampu bergerak dan bermanuver dengan lincah. Kapal jenis ini pada zaman dahulu digunakan untuk mengawal kapal dagang, namun saat ini digunakan untuk patroli samudra dengan kekuatan pemukul yang cukup mematikan. Saat ini China memiliki 65 unit *frigates*.

d) *Missiles*

China membangun dan mengembangkan sejumlah kemampuan canggih seperti rudal balistik anti kapal, MIRV dan kendaraan hipersonik, dimana terbagi menjadi 6 kelas, yaitu *Subsonic Cruise Missile (Cruise Rudal)*, *Sea Launches Ballistic Missile (SLBM)*, *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)*, *Intermediate Range Ballistic Missile (IRBM)*, *Medium Range Ballistic Missile (MRBM)*, dan *Short Range Ballistic Missile (SRBM)* (Missile Threat: CSIS Missile Defense

Project, n.d.).

3) *Penggelaran Kekuatan China di Laut China Selatan*

China sebagai salah satu *claimant state* terbesar di Laut China Selatan tidak pernah berhenti melakukan gelar kekuatan di perairan sengketa tersebut, dimana gelar kekuatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kedaulatannya atas Laut China Selatan. Terkait dengan klaim dan reklamasi yang telah dilakukan oleh China di Laut China Selatan, China terus melaksanakan berbagai kegiatan di perairan tersebut guna menjaga stabilitas kawasan dimaksud. Kegiatan yang dilakukan oleh China, antara lain dengan menggelar latihan militer, baik dengan negara lain atau tidak.

Aktivitas lain yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan adalah melakukan reklamasi batu karang yang berada di Kepulauan Spratly. Vietnam dan Filipina mengatakan bahwa China telah melakukan reklamasi dan pengadaan fasilitas secara tidak sah pada kawasan sengketa yang berpotensi digunakan sebagai kepentingan militer (BBC Indonesia, 2015). China telah melakukan reklamasi di Laut China Selatan sejak tahun 2013 dengan lebih dari 3200 area tanah baru di Kepulauan Spratly (Yazid, 2017, pp. 47–56). Menteri Luar Negeri China Hong Lei menegaskan Spratly adalah 'Kedaulatan yang tidak tergoyahkan' dan mereka memiliki hak untuk membangun pangkalan militer di kepulauan tersebut.

Selain itu, PLA Navy dan CCG juga menempatkan beberapa persenjataan di LCS. Persenjataan tersebut antara lain: S-400 *Surface to Air Missile System* merupakan jenis rudal udara ke permukaan yang mampu menghancurkan lalu lintas udara sipil dan militer sejauh 400 km, rudal ini sendiri merupakan hasil kesepakatan China dan Rusia pada tahun 2015 (Council of Foreign Relations, n.d.). Selanjutnya, terdapat YJ-18 *Anti Ship Cruise Missile (ASCM)* yang memungkinkan China untuk menyerang kapal komersil maupun militer sejauh 540km (Council of Foreign Relations, n.d.). Kemudian, terdapat J-11 *Fighter Jet* merupakan hasil modifikasi dari jenis pesawat Sukhoi 27 milik Rusia yang tersebar di Laut China Selatan yang memungkinkan China untuk mencegah dan menghancurkan jalur udara pesawat sipil maupun militer dalam radius tempur operasional 1500km (Council of Foreign Relations, n.d.). Terakhir, Y-8 *Patrol Aircraft*, merupakan pesawat tepur yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan maritim dalam jarak tempur 2500km (Council of Foreign Relations, n.d.).

PEMBANGUNAN JALUR SUTRA MARITIM ABAD 21 SEBAGAI STRATEGI PENDUKUNG PERTAHANAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN

Sebagai negara yang besar, China berambisi memadukan kedua jalur perdagangan laut dan darat yang telah berlangsung selama ribuan tahun menjadi satu konsep jalur perdagangan yang terintegrasi, yang dikenal dengan sebutan *One Belt One Road (OBOR)*. Jalur Sutra Maritim Abad 21 ini terbentang dari Pelabuhan Tianjin, Qingdao, Shanghai hingga pelabuhan di Asia Selatan, Afrika Timur dan Eropa (Suropti et al., 2016, pp. 24–25). Strategi tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran gravitasi politik dan ekonomi ke kawasan Samudra Atlantik dan Pasifik yang mengakibatkan panggung internasional akan tertuju ke Indo-Pasifik. Meningkatnya eskalasi konflik di Laut China Selatan akibat perebutan kepentingan kedaulatan dan keamanan nasional.

Kepentingan China yang besar di LCS memberikan penekanan pada keberhasilan Jalur Sutra Maritim Abad 21 dan memberikan peluang bagi China untuk merealisasikan kebijakan yang menekankan pada pengembangan kekuatan maritim. Salah satu aspek kerjasama yang memungkinkan dilakukan antara China dengan Indonesia adalah dalam hal pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan. Bagi pemerintah China, *Master Plant* Jalur Sutra Maritim dimulai di Quanzhou di Provinsi Fujian, melalui Guangzhou, Behai dan Haikou sebelum ke arah Selat Malaka. Dari Kuala Lumpur, Jalur Sutra Maritim mengarah ke Kalkuta, India dan menyeberangi Lautan Hindia hingga Nairobi, Kenya. Dari Nairobi, Jalur Maritim mengarah ke utara mengelilingi Benua Afrika dan bergerak melalui Laut Mati ke Laut Mediterania, berhenti di Athena, sebelum bertemu dengan Jalur Sutra Darat di Venesia (Kartini, 2015, pp. 135–136).

Melalui Jalur Sutra Maritim Abad 21, China berharap dapat meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain di sepanjang rute ini melalui peningkatan kepercayaan demi memelihara stabilitas dan kemakmuran regional. Meski demikian, Jalur Sutra Maritim Abad 21 ini dapat dipandang melalui sudut pandang yang lain, di mana jalur ini seakan memberikan gambaran jelas ke dunia internasional bahwa China dapat menjadi salah satu *super power* yang mampu menyaingi Amerika Serikat. Selain itu, Jalur Sutra Maritim dapat menjadi *bargaining point* yang kuat untuk mempertahankan klaimnya di Laut China Selatan.

KESIMPULAN

Laut China Selatan (LCS) merupakan perairan luas yang terbentang dari Barat Daya ke Timur Laut dengan luas sebesar 4.000.000 km² yang menjadi panggung bagi negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik untuk meraih *power*. Salah satu di antara negara tersebut adalah China sebagai *claimant state* terbesar. Xi Jinping menanamkan Doktrin geopolitik Zengmu Ansha kepada rakyatnya. Selain prinsip fundamental tersebut, Xi juga memiliki doktrin pertahanan defensif aktif, dimana China berusaha untuk menggunakan kekuatan lawan sebagai peluang bagi keberhasilannya.

China memiliki beberapa strategi dalam melindungi kepentingan keamanannya di LCS, yaitu mengoptimalkan kekuatan militernya dan melakukan berbagai gelar kekuatan di LCS. Kekuatan militernya ini sendiri didukung oleh *latent power* yang dimiliki. Selain strategi pertahanan yang bersifat *hard power*, China juga mengerahkan strategi yang bersifat *soft power*, yaitu pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad 21. JSM ini melalui benua Asia ke Eropa, yang bertujuan untuk menambah kekuatannya di bidang ekonomi.

REFERENSI

- Asmoro, R. D. (2016). Konflik Laut China Selatan Pasca Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA). *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 64–80. http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_28_Desember_2016.pdf
- BBC Indonesia. (2015, April 20). *Filipina minta China hentikan reklamasi di Laut China Selatan*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150420_filipina_China_reklamasi#

orb-banner

- Council of Foreign Relations. (n.d.). *China's Maritime Disputes*. https://www.cfr.org/interactives/chinas-maritime-disputes?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide#!/chinas-maritime-disputes?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide
- Global Security. (n.d.). *China's Defense Budget*. Retrieved April 20, 2018, from <https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm>
- Harini, S. (2011). Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut China Selatan. *Transformasi*, 14(21), 43–50. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/214>
- Jasmine, R. (2013, October 3). *Konsep Kepentingan Nasional*. Blog Civitas Akademia UNAIR. http://rosaliajasmine-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84819-SOH101 (Pengantar Ilmu Hubungan Internasional)-Kepentingan Nasional.html
- Kartini, I. (2015). Kebijakan Jalur Sutra Baru China dan Implikasinya Bagi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(2), 131–147. <https://jkw.psdri.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/334>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Postur Pertahanan Negara. In *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf>
- Kusumoprojo, W. S. (2009). *Indonesia Negara Maritim*. Teraju.
- Lewa, A. H. (2007). Pola Perubahan Kebijakan Luar Negeri China. *LITE*, 3(2), 67–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.33633/lite.v3i2.615>
- Lewi, S. (2009). *Teori Tiga Perwakilan Jiang Zemin dalam Sosialisme Berkarakteristik China* [Universitas Indonesia]. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127146-RB06S114t-Teori tiga-Pendahuluan.pdf>
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Rajagrafindo Persada.
- Missile Threat: CSIS Missile Defense Project. (n.d.). *Missiles of China*. Retrieved April 20, 2018, from <https://missilethreat.csis.org/country/china/>
- Morgenthau, H. J. (1973). *Politics Among Nations*. Prentice Hall.
- Ng, K. P. (2005). *Interpreting China's Military Power: Doctrine Makes Readiness*. Frank Cass.
- Prasetyono, E. (2008). Strategi Pertahanan Indonesia di Masa Depan. *Analisis CSIS*, 37(3), 347–361.
- Sharma, G. (2012). People's Liberation Army Ground Forces Modernisation-An Assessment. *Scholar Warrior*, 40–62. https://archive.claws.in/images/journals_doc/SW J.62-84.pdf
- Sitepu, P. A. (n.d.). *Studi Hubungan Internasional*. Graha Ilmu.
- Sitohang, J., Dam, S., Luhulima, C. P. F., & Et.al. (2008). *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press.
- Suropati, U., Sulaiman, Y., & Montratama, I. (2016). *Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21*. PT Elex Media Komputindo.
- UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS). (2009, May 7). *Permanent Mission of the People's Republic of China, Notes Verbales CML/17/2009 and CML/18/2009*.

https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf

Vuković, S., & Alfieri, R. (2020). Halting and Reversing Escalation in the South China Sea: A Bargaining Framework. *Global Policy*, 11(5), 598–610. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12868>

Wirawan, H., & Subekti, A. R. (2012). *Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional Indonesia*. Universitas Indonesia Press.

Yazid, R. (2017). *Potensi Ancaman Klaim China di Laut China Selatan terhadap Terganggunya kepentingan Singapura di Selat Malaka* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/36198/>